

Petugas Gabungan Razia Nelayan Penangkap Banih Lobster di Pangandaran

PANGANDARAN (IM) - Petugas gabungan melancarkan operasi penerbitan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Pangandaran, Sabtu (20/3) malam. Penerbitan ini difokuskan kepada pelanggaran penangkapan beni lobster yang dilakukan oleh nelayan.

Petugas gabungan terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpolair Pangandaran, TNI Angkatan Laut, Satpol PP, HNSI dan unsur lainnya.

Yana Rodiana, Kasi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Pangandaran mengatakan, operasi penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor : 523/0409/DKPKP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang larangan penangkapan beni lobster di wilayah perairan daerah Kabupaten Pangandaran.

"Intinya di Pemkab Pangandaran sudah dengan tegas melarang penangkapan bayi lobster sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerbitan langsung," kata Yana.

Namun demikian penerbitan penangkap bayi lobster ini diduga sudah bocor. Karena perairan yang biasanya ramai oleh perahu penangkap bayi lobster mendadak sepi.

Petugas hanya mendapati perahu-perahu yang ditambatkan di sekitar pantai. Sementara alat-alat penangkap dan perlengkapan lainnya ditinggalkan di atas perahu.

Petugas pun akhirnya mengamankan alat tangkap bayi lobster yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut.

Barang bukti yang diamankan berupa jaring rumpun sekitar 30 set, genset 8 unit, accu 6 unit dan lampu-lampu penerangan. Semua barang bukti tersebut diamankan ke markas Satpolair Pangandaran untuk dilakukan pendataan dan pemanggilan terhadap pemiliknya.

Komandan Pos TNI AL Pangandaran, Kapten Laut Toto Sukarto mengatakan nelayan pemilik alat-alat tersebut kemudian diberi pembinaan. "Kami beri pembinaan agar tak lagi menangkap bayi lobster," kata Toto. ● **pur**

IDN/ANTARA



PASEPATI SAMBUT PEMILIK BARU PERSIS SOLO

Anggota Pasepatis mengusung poster untuk menyambut pemilik saham mayoritas sekaligus Direktur Utama PT Persis Solo Saestu (PSS) Kaesang Pangarep di kawasan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/3). PT Persis Solo Saestu resmi berganti kepemilikan saham kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kevin Nugroho yang menargetkan Persis Solo maju ke Liga 1 Indonesia.

Vaksinasi Massal di Mall Bogor, Upaya Bangkitkan Ekonomi

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Bima Arya berharap dengan digelar program vaksinasi Covid-19 massal di pusat perbelanjaan atau mall bisa mendorong perekonomian di Kota Bogor. Sebab, selama pandemi ini cukup banyak mal yang mengalami penurunan.

"Targetnya bukan hanya melakukan atau mengejar target akselerasi, tapi juga ada bangkitan ekonomi," kata Bima Arya saat meninjau program vaksinasi massal di Mall Boxies, Kota Bogor, Minggu (21/3).

Lebih lanjut, Bima Arya menambahkan dengan adanya kegiatan vaksinasi massal untuk menanggulangi pandemi Covid-19 diharapkan mall di Kota Bogor kembali bergairah dan ramai dikunjungi, tentunya dengan protokol kesehatan.

"Yang jelas vaksinasi massal di mall ini sesuai dengan arahan presiden untuk akselerasi percepatan karena di

fasilitas kesehatan saja tidak cukup. Dan hari ini mulai, 750 ini ada dari enam mall," ungkapnya.

Lantaran, baru satu mall dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggerakkan seluruh mall di Kota Bogor untuk membuka program vaksinasi massal.

"Nah dalam beberapa hari ke depan ditambah lagi di beberapa mall," katanya.

Terkait bangkitan ekonomi, menurutnya vaksinasi di mall adalah salah satu strategi sebagaimana arahan presiden. "Ini juga sesuai dengan arahan presiden agar ekonomi digenjot dengan protokol kesehatan hari ini 750. Mungkin ke depan akan kita tambah kapasitasnya, karena melihatnya 1.500 juga bisa," katanya.

Menurut Bima, jika semua vaksinasi massal di Kota Bogor ini berjalan lancar maka target pertama 109 ribu ini terpenuhi di bulan Juni. ● **gio**

Pemilik Lahan Bantah Tanah di Ciledug yang Ditembok 2 Meter Jalan Umum

TANGERANG (IM) - Camat Ciledug, Syarifuddin, menyatakan lahan sengketa tempat berdirinya tembok setinggi 2 meter yang menutup akses rumah Hadiyanti (60) merupakan jalan umum. Salah satu ahli waris tanah, Herry Mulya, membantahnya.

"Jadi, kenapa itu dianggap jalan umum? Tadinya bidang tanah itu kan fasilitas saya sendiri. Karena ada keterangan dari Pak Camat di satu berita yang beredar, bahwa tanah itu sudah dihibahkan oleh kami," ujar Herry saat dihubungi, Minggu (21/3).

Herry mengaku tidak mengerti bagaimana bisa tanah milik orang tuanya, Anas Burhan, yang sudah meninggal pada 2009, tiba-tiba dihibahkan menjadi jalan umum. Sebab, anak-anak Anas yang notabene merupakan ahli waris saja belum dilakukan pecah waris. "Ya nggak ngerti (dihibahkan ke siapa). Orang tua saya meninggal 2009. Sekarang 2021. Kita belum pecah waris, belum dibagi-bagi ke anak-anaknya, tanah-tanahnya milik orang tua. Jadi tanpa ditanya pun, nggak ada satu pun ahli waris yang bisa hibahkan karena nggak ada surat hibahnya," katanya.

"Tapi yang beredar itu katanya sudah hibah untuk jalan

umum. Kalau hibah ada akatanya, ini nggak ada. Makanya berita yang beredar itu dapat dari mana?," sambung Herry.

Terlebih, lanjut Herry, pihaknya tidak mungkin berani membuat pagar penghalang tanpa izin terlebih dahulu pada 2019. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan sebagai jalan umum, protes pasti berdatangan saat pemasangan tembok.

"Iya dong. Kalau nggak diizinkan, pasti dihancurkan. Kan kami nggak tinggal di situ. Mustahil rasanya kita bisa bangun di tanah orang, dan orangnya terganggu. Kan gitu. Pasti mereka protes kan, 'Pak nggak bisa, Pak. Ini udah hibah untuk kami atau umum. Ini akatanya.' Kan begitu," tandasnya.

Diketahui, Camat Ciledug, Syarifuddin, pernah mengungkapkan lahan sengketa yang menutup akses rumah warga merupakan jalan umum. Hal itu berdasarkan data dokumen fisik dan yuridis bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Berdasarkan warkah dari BPN, itu jalan umum," kata Syarifuddin saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (16/3). ● **pp**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

VAKSINASI MASSAL COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA BOGOR

Sejumlah karyawan retail menunggu di ruangan observasi usai mendapat suntikan vaksin Covid-19 di Mall Boxies 123, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/3). Dinas Kesehatan Kota Bogor mulai melakukan vaksinasi massal di pusat perbelanjaan dengan target sebanyak 16 ribu karyawan dari 17 retail di Kota Bogor sebagai upaya membangkitkan kembali perekonomian.

Bupati Bogor Tetap Ngotot Bangun Jalur Puncak II

Dengan adanya jalur Puncak II ini diharapkan akan mendorong perekonomian masyarakat Bogor Timur terutama sektor pertanian di wilayah Kecamatan Tanjungsari dan Sukamakmur.

BOGOR (IM) - Bupati

Bogor, Ade Yasin tetap ngotot bahwa Jalan Poros Tengah Timur atau Jalur Puncak II perlu segera dibangun. Alasannya, dapat mendorong perekonomian masyarakat wilayah Bogor Timur.

Tak hanya itu, Ade Yasin juga menyebutkan keberadaannya dapat mengurangi kemacetan di jalur Puncak II, juga dapat menekan angka kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima Kecamatan wilayah Bogor Timur Kabupaten Bogor.

Ade menjelaskan dari 5,45 juta penduduk Kabupaten Bogor, sekitar 10,09% penduduk

atau lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan wilayah Bogor Timur, yaitu Citeureup, Babakan Madang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur akan terdampak dari pembangunan jalur Puncak II tersebut.

"Bahkan lebih dari 190 ribu penduduk di 18 desa akan mendapatkan akses langsung dari jalur Puncak II itu," kata Ade Yasin dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (21/3).

Tidak hanya itu, ada sekitar 24.917 penduduk miskin di lima Kecamatan Wilayah Bogor Timur, yang akan dilewati jalur Puncak II.

Terutama wilayah Kecamatan Sukamakmur dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang mencapai 17.360 jiwa. "Saat ini konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di wilayah tengah yaitu Babakan Madang dan Citeureup terutama di sektor industri, konstruksi serta perdagangan dan jasa," katanya.

Kemudian, lanjut dia, dengan adanya jalur Puncak II ini diharapkan akan mendorong perekonomian masyarakat Bogor Timur terutama sektor pertanian di wilayah Kecamatan Tanjungsari dan Sukamakmur.

Menurutnya, wilayah Bogor Timur memiliki potensi alam seperti gunung, Rawa Gede di Desa Sirnajaya dan wisata alam Khayangan di Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, serta produksi pertanian yang melimpah.

Salah satunya adalah Kopi Robusta Van Catangmalang Winey. Kopi terbaik Kabupaten Bogor yang pernah meraih penghargaan di Paris dengan predikat silver gourmet.

Ketua DPRD Cirebon: Kepemimpinan Bupati Kurang Maksimal!

CIREBON (IM) - Mendekati dua tahun kepemimpinan Bupati Cirebon, Imron, kritik datang dari Ketua DPRD, Moh Luthfi, Minggu (21/3). Luthfi menilai, masih banyak kinerja Imron yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang mengalami buta huruf. Di sinilah, indikator peningkatan kualitas SDM belum terdapat maksimal.

"Indikator sederhana ya dengan cara melihat fakta di lapangan. Kalau jumlah masyarakat yang masih buta hurufnya masih banyak, berarti eksekutif benar-benar harus fokus terhadap peningkatan kualitas SDM. Peran bupati disini, sangat besar," jelas Luthfi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, kurang sependapat kalau kinerja Bupati Imron, dinilai kurang maksimal. Menurutnya, kepemimpinan selama dua tahun masih terlalu dini untuk menilai kinerja kepala daerah. Masalah pengentasan buta aksara, adalah persoalan lama sejak bupati terdahulu, yang memang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Makanya kan sekarang kami di komisi IV dengan eksekutif,

sikap kebijakan yang belum terlihat dari eksekutif, mengenai peningkatan kualitas SDM. Bagaimanapun, peningkatan kualitas SDM adalah gerbang perubahan peradaban yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, kurang sependapat kalau kinerja Bupati Imron, dinilai kurang maksimal. Menurutnya, kepemimpinan selama dua tahun masih terlalu dini untuk menilai kinerja kepala daerah. Masalah pengentasan buta aksara, adalah persoalan lama sejak bupati terdahulu, yang memang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Makanya kan sekarang kami di komisi IV dengan eksekutif,

sedang mencari formula tepat. Bagaimana supaya bisa merubah SDM supaya IPM Kabupaten Cirebon bisa meningkat.

Kita ini IPM nya baru di nilai enam lebih sedikit. Ini kan rendah sekali," terang Siska.

Siska mengakui, komisi IV sedang konsen membuat terobosan, supaya angka buta huruf di Kabupaten Cirebon bisa ditekan sekecil mungkin. Masalahnya, angka buta huruf yang cukup tinggi, berpengaruh kepada IPM saat ini. Sementara anggaran untuk pendidikan yang angkanya mencapai Rp1,2 Trilyun, tidak sebanding dengan hasil IPM yang dihasilkan saat ini.

Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, kinerja Disdik Kabupaten Cirebon bisa maksimal.

"Komisi IV terus memetakan persoalan buta huruf. Kita sedang hitung, jumlah SD dan SMP ada berapa. Kita juga tidak bisa sendiri, peran desa sangat penting supaya data yang tersaji bisa valid. Kalau sudah validasi data, tinggal kita duduk bersama mencari solusi. Masalahnya untuk peningkatan SDM bukan Disdik saja yang terlibat, tapi banyak dinas lainnya," tukas Siska. ● **pur**



IDN/ANTARA

SUSUR SUNGAI MEMPERINGATI HARI AIR SEDUNIA

Sejumlah pegiat lingkungan yang tergabung dalam Republik Aer menyusuri Sungai Ciwulan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (21/3). Aksi menyusuri sungai sambil membersihkan sampah tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Air Sedunia, untuk mengkampanyekan menjaga air dan menghargai air sebagai sumber kehidupan.

Sejak dilakukan pengembangan jalur Puncak 2 pada tahun 2019, yang sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata wilayah Bogor Timur pada 2018 adalah nol. Kini PAD sektor pariwisata Bogor Timur mencapai 10 miliar.

"Pengembangan jalur puncak ini, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Bogor Timur. Jika perekonomian meningkat maka angka kemiskinan juga akan menurun," ungkapnya.

Ade Yasin juga mengung-

kapkan, pengembangan jalur Puncak 2 diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Bogor Timur.

"Mengingat IPM yang akan dilintasi jalur puncak 2 memiliki IPM cukup rendah seperti IPM Kecamatan Citeureup dibawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor yaitu 70,65, lalu IPM Babakan Madang 65,49, Kecamatan Cariu 59,17, Kecamatan Tanjungsari 56,71 dan Kecamatan Sukamakmur dengan IPM tetendah yakni 52,23," katanya. ● **gio**

Arief Berharap Warga Tangerang Divaksin Sebelum Mudik

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang tidak melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik pada momen lebaran 2021.

Wali Kota Tangerang, Arief Wisnansyah mengharuskan, semua warga Kota Tangerang bisa divaksin sebelum melakukan mudik untuk mengantisipasi tingginya penyebaran Covid-19 pada momen tersebut.

"Harapannya semua warga Kota Tangerang bisa selesai divaksin dulu sebelum mudik nanti," ujar Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/3).

Dia menegaskan, pihaknya terus fokus dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 seiring dengan datangnya vaksin. Pelaksanaan vaksinasi di Kota Tangerang diketahui telah dilakukan terhadap para tenaga kesehatan (nakes) pada vaksinasi tahap satu dan masih berlangsung bagi para petugas pelayanan publik pada vaksinasi tahap dua. Termasuk di antaranya bagi kalangan lanjut usia (lansia),

pedagang, hingga pengemudi kendaraan umum.

Seiring dengan menunggu kuota vaksin datang, Arief juga meminta masyarakat Tangerang bisa bijak terhadap kebijakan mudik yang telah ditetapkan.

Meskipun diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun ini, dia menilai kebijakan tersebut masih akan bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

"Mengingat saat ini masih divaksin dulu sebelum mudik karena penambahan kasus Covid-19 biasanya terjadi ketika ada libur panjang," terangnya. Pasalnya, bisa jadi masyarakat menjadi carrier virus Covid-19 bisa keluarga di kampung.

Arief menambahkan, pada pekan depan, pemerintah akan membahas terkait mudik Lebaran 2021 dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Akan ada pembahasan bersama dengan BPTJ Selasa depan," kata dia. ● **pp**

Warga Demo PPLI Timbulkan Bau Menyengat

BOGOR (IM) - Bau menyengat yang diduga berasal dari kebocoran gas yang terjadi di lokasi pengelolaan limbah milik PT (PPLI) Prasad Pamunah Limbah Industri yang berlokasi di Kp. Walahir, Desa Nambo, Kecamatan Klapa Nunggal, kabupaten Bogor, menimbulkan keresahan warga masyarakat sekitarnya.

Hal tersebut memicu ratusan warga melakukan aksi demo di depan PT PPLI pada Jum'at (19/3).

Aksi demo ratusan warga dari beberapa desa, di antaranya warga Desa Nambo, Desa Kembang Kuning, Desa Lulut dan desa lainnya. Aksi yang dilakukan secara spontan itu, nyaris ricuh, karena beberapa warga sempat bersempitan dengan pihak keamanan PT PPLI.

Kepada wartawan di lokasi, salah satu warga mengatakan, jika bau menyengat yang berasal dari kebocoran gas itu sangat mengganggu pernapasan. "Baunya sangat menyengat kang dan kulit saya pun terasa pedih seperti terbakar, serta mata pun jadi perih," tutur warga yang enggan dipublikasikan identitasnya.

Warga juga menjelaskan bau akibat kebocoran gas tersebut terjadi pukul 17.00 WIB dan sampai saat ini, bau menyengat itu belum bisa diatasi, sehingga kami dan warga lainnya sangat terganggu sekali. Kepala saya pusing ingin muntah dan perih terkena kulit seperti terbakar, imbuhnya.

Kejadian seperti ini sudah dua kali terjadi, kami warga sekitar tidak tahu bahwa pabrik PT PPLI adalah pabrik sampah atau limbah.

"Waktu pembangunan PT tersebut tadinya kami diberitahukan bahwa peruntukannya buat PT garmen dan dulu ketika pabrik itu berdiri kami sempat dikasih uang kompensasi sebesar Rp40.000 per bulan dan itu tidak berlangsung lama dan sekarang tidak sama sekali. Saya berharap PT tersebut ditutup saja karena dampaknya sangat mengganggu kenyamanan kami," tegasnya.

Di tempat yang sama, Panjaitan, salah seorang warga lainnya meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT PPLI, karena anaknya yang berumur dua tahun harus dirawat karena diduga menghirup bau kimia yang menyengat tersebut.

"Pihak PT PPLI harus menutup perusahaan, dan bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Anak saya sakit akibat menghirup bau gas bocor tersebut. Saya sudah coba konfirmasi, tapi pihak PT PPLI bilang nanti aja hari senin. Ini kurang ajar sekenanya aja dia ngomong seperti itu," tukasnya dengan nada marah dan jengkel.

Terpisah Kepala desa Nambo Nanang, SE yang berada di lokasi PT PPLI menerangkan bahwa pihak perusahaan PT PPLI saat ini belum bisa dikonfirmasi. "Kita tunggu saja mudah-mudahan besok pihak perusahaan PT PPLI bisa berdialog dan saya berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi," pungkasnya kepada wartawan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui apa penyebab kebocoran gas yang bau menyengatnya terekam hingga jarak radius puluhan kilometer tersebut. ● **gio**